

**PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP *TAX AVOIDANCE*
PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG TERDAFTAR
DI BURSA EFEK INDONESIA**

ABSTRAK

Oleh

Nama : KHOIRUNNISA

NPM : 0851031025

No. Telp : 0896-9201-3999

Email : khoirunnisa90@gmail.com

Pembimbing I : Fitra Dharma, S.E., M.Si.

Pembimbing II : Retno Yuni Nur S, S.E., M.Sc., Akt.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan. Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Peneliti ingin melakukan penelitian kembali tentang pengaruh komponen *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia tahun 2011-2013.

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan, perusahaan yang diambil sebagai sampel sebanyak 32 perusahaan yang dilakukan secara *purposive sampling*, dan jumlah observasi yang dilakukan selama tahun 2011-2013 adalah 96 item observasi. Data dianalisis dengan menggunakan analisis regresi berganda dengan software SPSS 17.0, serta uji statistik t sebagai uji hipotesis.

Hasil penelitian menyebutkan bahwa, hanya variabel dewan komisaris independen dan kualitas audit yang terbukti memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*. Sedangkan variabel kepemilikan institusional, komite audit dan dewan direksi tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Bagi perusahaan agar dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang *tax avoidance*, sehingga manajemen perusahaan bias merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutan perusahaannya dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan pajak yang ilegal sehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan pajak yang dapat merugikan negara dan dapat menjadikan nama dan reputasi perusahaan tersebut menjadi buruk di mata publik.

Kata Kunci : *Corporate Governance, Tax Avoidance.*

**INFLUENCE OF CORPORATE GOVERNANCE AGAINST TAX AVOIDANCE
IN MANUFACTURING COMPANIES LISTED IN
INDONESIA STOCK EXCHANGE**

ABSTRACT

Oleh

Nama : KHOIRUNNISA

NPM : 0851031025

No. Telp : 0896-9201-3999

Email : khoirunnisa90@gmail.com

Pembimbing I : Fitra Dharma, S.E., M.Si.

Pembimbing II : Retno Yuni Nur S, S.E., M.Sc., Akt.

Corporate governance is a corporate governance that describes the relationship between the various participants in the company that determines the direction of the company's performance. The number of companies that do tax evasion prove that corporate governance has not been fully carried out by public companies in Indonesia. Researchers wanted to do research on the influence of the components back against tax avoidance corporate governance in companies listed in Indonesia Stock Exchange in 2011-2013.

The data used in this research is secondary data obtained from the annual report, the company sampled 32 companies conducted by purposive sampling, and the number of observations made during 2011-2013 was 96 items observation. Data were analyzed using multiple regression analysis with SPSS 17.0 software, and statistical test t as hypothesis testing.

The results mentioned only variable independent board and audit quality are proven to have a negative influence on tax avoidance. While institutional ownership variable, the audit committee and the board of directors has no effect on tax avoidance. Suggestion for the company in order to be material to gain knowledge and insight about tax avoidance, so that the management company can devise mechanisms for implementing its continuation well, with no illegal tax planning so that the company does not undertake tax fraud that could harm the State and can worsen the name and The company's reputation.

Keywords : Corporate Governance, Tax Avoidance.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Bagi negara-negara yang ada di dunia ini pajak merupakan unsur penting dan bahkan paling penting dalam rangka untuk menopang anggaran penerimaan negara. Oleh karenanya pemerintah negara-negara di dunia ini begitu besar menaruh perhatian terhadap sector pajak. Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara yang paling besar. Setiap wajib pajak diwajibkan untuk ikut berpartisipasi agar laju pertumbuhan dan pelaksanaan pembangunan nasional dapat berjalan dengan baik demi kesejahteraan negara. Namun bagi masyarakat, pajak adalah beban karena mengurangi penghasilan mereka, terlebih lagi tidak mendapatkan imbalan langsung ketika membayar pajak. Hal inilah yang menyebabkan banyak dari masyarakat bahkan perusahaan yang melakukan penghindaran pajak (*tax avoidance*). Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah salah satu cara untuk menghindari pajak secara legal yang tidak melanggar peraturan perpajakan.

Penghindaran pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik, di satu sisi penghindaran pajak diperbolehkan, namun di sisi yang lain penghindaran pajak tidak diinginkan. Dalam konteks pemerintah Indonesia, telah dibuat berbagai aturan guna mencegah adanya penghindaran pajak. Salah satu aturan tersebut misalnya terkait *transfer pricing*, yakni tentang penerapan prinsip kewajaran dan kelaziman usaha dalam transaksi antara wajib pajak dengan pihak yang mempunyai hubungan istimewa (Perdirjen No. PER-43/PJ/2010, 2010).

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Isu mengenai *corporate governance* mulai mengemuka, khususnya di Indonesia pada tahun 1998 ketika Indonesia mengalami krisis yang berkepanjangan. Banyak pihak yang mengatakan lamanya proses perbaikan di Indonesia disebabkan oleh sangat lemahnya *corporate governance* yang diterapkan dalam perusahaan di Indonesia. Sejak saat itu, baik pemerintah maupun investor mulai memberikan perhatian yang cukup signifikan dalam praktek *corporate governance*.

Corporate governance merupakan tata kelola perusahaan yang menjelaskan hubungan antara berbagai partisipan dalam perusahaan yang menentukan arah kinerja perusahaan (Haruman, 2008). Banyaknya perusahaan yang melakukan penghindaran pajak membuktikan bahwa *corporate governance* belum sepenuhnya dilakukan oleh perusahaan-perusahaan publik di Indonesia. Penelitian mengenai pengaruh *corporate governance* terhadap *tax avoidance*.

Berdasarkan uraian di atas, maka penulis tertarik melakukan penelitian dengan judul penelitian sebagai berikut **“Pengaruh Corporate Governance Terhadap Tax Avoidance pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas. Maka perumusan masalah pada penelitian ini adalah:

1. Apakah kepemilikan institusional berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
2. Apakah dewan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
3. Apakah kualitas audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
4. Apakah komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?
5. Apakah dewan direksi berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang penulis kemukakan diatas, maka dapat dijelaskan tujuan dari penelitian ini adalah: membuktikan secara empiris pengaruh komponen *corporate governance* seperti kepemilikan institusional, dewan komisaris independen, kualitas audit, komite audit, dan dewan direksi terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013.

BAB II

LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

2.1 Agency Theory

Teori keagenan dalam perusahaan mengidentifikasi adanya pihak-pihak dalam perusahaan yang memiliki berbagai kepentingan untuk mencapai tujuan dalam kegiatan perusahaan. Teori ini muncul karena adanya hubungan antara prinsipal dan agen. Teori agensi mengasumsikan bahwa semua individu bertindak atas kepentingan mereka sendiri. Pemegang saham sebagai prinsipal diasumsikan hanya tertarik kepada hasil keuangan yang bertambah atau investasi mereka di dalam perusahaan. Sedangkan para agen diasumsikan menerima kepuasan berupa kompensasi keuangan dan syarat-syarat yang menyertai dalam hubungan tersebut. Teori ini berusaha untuk menggambarkan faktor-faktor utama yang sebaiknya dipertimbangkan dalam merancang kontrak insentif (Warsidi dan Pramuka, 2009).

2.2 Corporate Governance

Pasal Surat Keputusan Menteri BUMN No. 117/M-MBU/2002 tanggal 31 juli 2002 tentang penerapan GCG pada BUMN menyatakan bahwa *corporate governance* adalah “suatu proses dan stuktur yang digunakan oleh organ BUMN untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabilitas perusahaan guna mewujudkan nilai pemegang saham dalam jangka panjang dengan tetap memperhatikan pemangku kepentingan (*stakeholder*) lainnya, berdasarkan peraturan perundangan dan nilai-nilai etika”. Definisi ini menekankan pada keberhasilan usaha dengan memperhatikan akuntabilitas yang berdasarkan pada peraturan perundangan dan nilai-nilai etika serta memperhatikan *stakeholder* yang tujuan jangka panjangnya adalah untuk mewujudkan dan meningkatkan nilai pemegang saham.

2.2.1 Prinsip Corporate Governance

1. *Transparancy* (Transparansi)

Untuk menjaga obyektivitas dalam menjalankan bisnis, perusahaan harus menyediakan informasi yang material dan relevan dengan cara yang mudah diakses dan dipahami oleh pemangku kepentingan. Perusahaan harus mengambil inisiatif untuk mengungkapkan tidak hanya masalah yang disyaratkan oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga hal yang

penting untuk pengambilan keputusan oleh pemegang saham, kreditur dan pemangku kepentingan lainnya.

2. *Accountability* (Akuntabilitas)

Perusahaan harus dapat mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan dan wajar. Untuk itu perusahaan harus dikelola secara benar, terukur dan sesuai dengan kepentingan perusahaan dengan tetap memperhitungkan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lain. Akuntabilitas merupakan prasyarat yang diperlukan untuk mencapai kinerja yang berkesinambungan.

3. *Responsibility* (Tanggung Jawab)

Perusahaan harus mematuhi peraturan perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen* (perusahaan yang baik).

4. *Independensi* (Kemandirian)

Untuk melancarkan pelaksanaan asas GCG, perusahaan harus dikelola secara independen sehingga masing-masing organ perusahaan tidak saling mendominasi dan tidak dapat diintervensi oleh pihak lain.

5. *Fairness* (Kewajaran)

Dalam melaksanakan kegiatannya, perusahaan harus senantiasa memperhatikan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya berdasarkan asas kewajaran dan kesetaraan. Prinsip-prinsip *corporate governance* dari OECD menyangkut hal-hal sebagai berikut:

1. Hak-hak para pemegang saham;
2. Perlakuan yang sama terhadap para pemegang saham;
3. Peranan semua pihak yang berkepentingan (stakeholders) dalam *corporate governance*;
4. Transparansi dan penjelasan;
5. Peranan dewan komisaris.

2.3 Tax Avoidance

Meminimalisasi beban pajak dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari yang masih berada dalam bingkai peraturan perpajakan sampai dengan yang melanggar peraturan perpajakan. Upaya meminimalkan pajak secara eufimisme sering disebut dengan perencanaan pajak (*tax planning*). Umumnya perencanaan pajak merujuk pada proses merekayasa usaha dan transaksi wajib pajak (WP) supaya utang pajak berada dalam jumlah minimal tetapi masih dalam bingkai peraturan perpajakan (Suandy, 2008). Penghindaran pajak atau perlawanan terhadap pajak adalah hambatan-hambatan yang terjadi dalam pemungutan pajak sehingga mengakibatkan berkurangnya penerimaan kas negara. *Tax avoidance* selalu diartikan sebagai kegiatan yang legal. Biasanya perusahaan melakukan strategi-strategi atau cara-cara yang legal sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku, namun dilakukan dengan memanfaatkan hal-hal yang sifatnya ambigu dalam undang-undang sehingga dalam hal ini wajib pajak memanfaatkan celah-celah yang ditimbulkan oleh adanya ambiguitas dalam undang-undang perpajakan (Suandy, 2008). Strategi penghematan pajak tersebut disebut juga sebagai suatu strategi pajak yang agresif. Komite urusan fiskal dari *Organization for Economic Cooperation and Development* (OECD) menyebutkan tiga karakter penghindaran pajak:

1. Adanya unsur artifisial di mana berbagai pengaturan seolah-olah terdapat di dalamnya padahal tidak, dan ini dilakukan karena ketiadaan faktor pajak.
2. Memanfaatkan *loopholes* dari undang-undang atau menerapkan ketentuan-ketentuan legal untuk berbagai tujuan, padahal bukan itu yang sebetulnya dimaksudkan oleh pembuat undang-undang.

Para konsultan menunjukkan alat atau cara untuk melakukan penghindaran pajak dengan syarat wajib pajak menjaga serahasia mungkin (*Council of Executive Secretaries of Tax Organization*, 1991, dalam Annisa dan Kurniasih, 2012).

Beberapa resiko yang ditimbulkan oleh kegiatan *tax avoidance* antara lain: denda, publisitas dan reputasi (Friese dkk, 2006). Sebuah pendekatan teoritis menekankan interaksi dari aktivitas *tax avoidance* dan problem agensi yang merekat pada perusahaan *go public* (Sartori, 2010). Sekat yang membatasi legal dan ilegalnya suatu tindakan penghematan pajak dalam upaya *tax planning* masih sulit untuk dibedakan (Bovi, 2005), sehingga diharapkan perusahaan lebih baik mematuhi peraturan perpajakan dan tidak memanfaatkan ambiguitas dari peraturan perpajakan untuk kebaikan perusahaan di masa yang akan datang.

2.4 Penelitian Terdahulu

Annisa dan Kurniasih (2012) meneliti tentang Pengaruh *Corporate Governance* terhadap *Tax Avoidance*. Hasil dari penelitian tersebut adalah tidak terdapat pengaruh signifikan kepemilikan institusional, dan komposisi dewan komisaris independen terhadap *tax avoidance*, sedangkan komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

Irawan dan Aria (2012) meneliti tentang Kompensasi Manajemen dan *Corporate Governance* terhadap Manajemen Pajak Perusahaan. Hasil dari penelitian tersebut adalah menemukan hubungan yang signifikan antara *corporate governance* dan kompensasi dengan manajemen pajak, kepemilikan saham institusi berpengaruh negatif. kepemilikan saham direksi dan kompensasi memberikan pengaruh yang positif.

Sartori (2010) meneliti tentang *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Sartori adalah mekanisme *corporate governance* yang terstruktur dengan baik maka akan berbanding lurus dengan kepatuhan perusahaan dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Selain itu hasil penelitian ini membuktikan bahwa strategi pajak berpengaruh secara negatif terhadap kepemilikan saham perusahaan dan kualitas audit.

Bernard (2011) meneliti tentang Pengaruh Karakteristik *Corporate Governance*, Kompensasi terhadap Manajemen Pajak. Hasil dari penelitian yang dilakukan oleh Bernard adalah terdapat hubungan signifikan positif antara jumlah dewan komisaris dengan manajemen pajak dan hubungan signifikan negatif antara proporsi dewan komisaris independen dan kompensasi dengan manajemen pajak.

2.5 Pengembangan Hipotesis

2.5.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avoidance*

Besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan mempengaruhi kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin kecil kepemilikan institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar kepemilikan institusional maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara

yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Hasil penelitian yang dilakukan oleh Khuranadan Moser (2009) dalam Annisa dan Kurniasih (2012) adalah besar kecilnya konsentrasi kepemilikan institusional maka akan berpengaruh secara negatif terhadap kebijakan pajak agresif oleh perusahaan, dan semakin besarnya konsentrasi *short-term shareholder* institusional akan meningkatkan kebijakan pajak agresif, tetapi semakin besar konsentrasi kepemilikan *long-term shareholder* maka akan semakin mengurangi tindakan kebijakan pajak yang agresif. Selain itu hasil penelitian Irawan dan Aria (2012) menemukan bahwa kepemilikan saham institusi berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak yang dilakukan oleh perusahaan.

H1: Kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance

2.5.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap Tax Avoidance

Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Subprinsip ini menyatakan dua elemen penting dari tanggung jawab pengelolaan dewan, yaitu kewajiban kehati-hatian dan kewajiban kesetiaan. Semakin banyak komisaris independen maka pengawasan manajemen akan semakin ketat. Meskipun demikian hasil penelitian Pohan (2008) membuktikan bahwa komisaris independen mempunyai pengaruh positif terhadap *tax avoidance* dan *tax evasion* manajemen kerap kali bersifat oportunistik dimana mereka memiliki motif untuk memaksimalkan laba bersih agar meningkatkan bonus. Laba selama ini dijadikan indikator utama keberhasilan manajer.

H2: Dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance.

2.5.3 Pengaruh Kualitas Audit Independen Terhadap Tax Avoidance

Salah satu elemen penting dalam *corporate governance* adalah transparansi. Transparansi terhadap pemegang saham dapat dicapai dengan melaporkan hal-hal terkait perpajakan pada pasar modal dan pertemuan para pemegang saham. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The BigFour* (Price Waterhouse Cooper - PWC, Deloitte Touche

Tohmatsu, KPMG, Ernst & Young-E&Y) memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four*. Penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

H3: Kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.5.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance*. Daniri (2006) dalam Pohan (2008) menyebutkan sejak direkomendasikan GCG di Bursa Efek Indonesia tahun 2000, komite audit telah menjadikomponen umum dalam struktur *corporate governance* perusahaan publik. Pada umumnya, komite ini berfungsi sebagai pengawas proses pembuatan laporan keuangan dan pengawasan internal, karena BEI mengharuskan semua emiten untuk untuk membentuk dan memiliki komite audit yang diketuai oleh komisaris independen.

H4 : Komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

2.5.5 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Tax Avoidance*

Dewan direksi dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan direksi memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan direksi. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris untuk melakukan pengelolaan perusahaan dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*). Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Penulis menentukan perusahaan-perusahaan yang dijadikan sampel adalah perusahaan besar dan memiliki kompleksitas tinggi. Diharapkan semakin banyak jumlah dewan direksi akan meningkatkan kompetensi antar direksi sehingga tata kelola perusahaan yang baikdapat tercapai, hal ini diperkuat dengan penelitian Irawan dan Aria (2012) yang membuktikan bahwa kepemilikan saham direksi memberikan pengaruh yang positif terhadap manajemen pajak.

H5 : Dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Sampel dan Data Penelitian

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang terdaftar pada tahun 2011-2013 di Bursa Efek Indonesia (BEI). Teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *nonprobability sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang tidak memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur atau anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiono, 2009). Dalam penelitian ini perusahaan yang menjadi sampel dipilih berdasarkan *purposive sampling* (kriteria yang dikehendaki). Kriteria sampel dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011-2013.
2. Perusahaan manufaktur yang selama tahun penelitian 2011-2013 tidak mengalami delisted.
3. Perusahaan manufaktur yang secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2011-2013.
4. Laporan keuangan dinyatakan dalam mata uang rupiah. Dikarenakan penelitian dilakukan di Indonesia maka laporan keuangan yang digunakan adalah yang dinyatakan dalam rupiah.
5. Perusahaan manufaktur yang memiliki data mengenai kepemilikan saham perusahaan, komisaris independen, komite audit dan dewan direksi selama tahun penelitian 2011-2013.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan data sekunder, karena data diperoleh secara tidak langsung atau melalui media perantara. Data penelitian didapat dari *website* pasar modal (www.idx.co.id) serta badan pengawas pasar modal (BAPEPAM).

3.2 Operasional Variabel Penelitian

Variabel penelitian pada dasarnya adalah sesuatu hal yang terbentuk apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik simpulan (Sugiyono, 2009). Variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

3.2.1 Variabel Dependen

Dalam penelitian ini yang menjadi variabel terikat adalah *tax avoidance* (Y). Pengukuran terkait *tax avoidance* dilakukan dengan menggunakan proksi *effective tax rates* (ETR) yang diharapkan mampu mengidentifikasi keagresifan perencanaan pajak perusahaan yang dilakukan menggunakan perbedaan tetap maupun perbedaan temporer (Chen *et al.* 2010) dengan rumus sebagai berikut:

$$ETR = \frac{\text{Beban Pajak Penghasilan}}{\text{Pendapatan Sebelum Pajak}}$$

3.2.2 Variabel Independen

Variabel independen merupakan variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahannya atau timbulnya variabel dependen / terikat (Sugiono, 2009). Variabel independen dalam penelitian ini adalah:

1. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan sebagian saham oleh perusahaan ini dapat dijadikan sebagai kontrol dalam pelaporan keuangan (Chen *et al.*, 2010). Rasio kepemilikan saham oleh perusahaan dapat diukur dengan:

$$KI = \frac{\text{Total saham yang dimiliki Institusi}}{\text{Total saham beredar}}$$

2. Dewan Komisaris Independen

Pengukuran komisaris independen ini dapat diperoleh dengan cara menjumlahkan komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris (Khurana dan Moser, 2009 dalam Annisa dan Kurniasih, 2012). Informasi mengenai jumlah komisaris independen diperoleh dari laporan tahunan perusahaan dan dari pengumuman yang dikeluarkan oleh BEI.

$$\text{Komin} = \frac{\text{komisaris independen}}{\text{jumlah komisaris}}$$

3. Kualitas Audit

Kualitas audit biasa diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran kantor akuntan publik (KAP) yang melakukan audit pada suatu perusahaan, jika perusahaan diaudit oleh kantor akuntan publik (KAP) *The Big Four*, maka akan lebih independen karena lebih dapat bertahan dari tekanan manajer untuk melaporkan adanya pelanggaran (Scott, 2003 dalam Annisa dan

Kurniasih, 2012). Variabel kualitas audit menggunakan variabel *dummy*. Jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP *Big 4* maka diberikan nilai 1, sedangkan jika sebuah perusahaan diaudit oleh KAP non *Big 4*, maka diberikan nilai 0.

4. Komite Audit

Komite audit merupakan salah satu bentuk nyata dari penerapan *good corporate governance* atau tata kelola yang baik. Banyak para pihak, terutama dari pihak investor menganggap bahwa dengan adanya komite audit menjadi nilai tambah bagi sebuah perusahaan. Investor akan lebih merasa aman jika berinvestasi pada perusahaan yang telah menerapkan *good corporate governance*. Setiap jenis perusahaan, karakteristik komite auditnya pun berbeda pula, dalam penelitian ini digunakan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan sebagai alat ukur variabel komite audit (Chen *et al.* 2010).

5. Dewan Direksi

Ukuran dewan komisaris akan berdampak terhadap kualitas keputusan dan kebijakan yang telah dibuat dalam rangka mengefektifkan pencapaian tujuan organisasi. Ukuran dewan dalam penelitian ini diukur dengan menjumlah total anggota dari dewan direksi (Subramaniam *et al.*, 2009).

3.3 Metode Analisis Data

3.3.1 Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif dalam penelitian ini digunakan untuk memberikan deskripsi atau variabel-variabel penelitian. Statistik deskriptif akan memberikan gambaran atau deskripsi umum dari variabel penelitian mengenai nilai rata-rata (mean), standar deviasi, maksimum, minimum, sum. Pengujian ini dilakukan untuk mempermudah dalam memahami variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian.

3.3.2 Analisis Regresi Linear Berganda

Metode regresi linear berganda dilakukan terhadap model yang diajukan oleh peneliti menggunakan program SPSS untuk memprediksi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Berdasarkan rumusan masalah dan kerangka pemikiran teoritis yang telah diuraikan sebelumnya, maka model penelitian regresi yang dibentuk untuk penelitian ini, adalah sebagai berikut (Ghozali, 2009):

$$Y = b_0 + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + b_4X_4 + b_5X_5 + e_t$$

Keterangan :

- Y : Tax avoidance
- X₁ : Kepemilikan institusional
- X₂ : Komisaris independen
- X₃ : Kualitas audit
- X₄ : Ukuran komite audit
- X₅ : Dewan direksi
- e_t : *Error term*

3.3.3 Pengujian Hipotesis

Pengujian ini menggunakan uji statistik t, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas / independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dasar pengambilan keputusan :

- Jika t hitung lebih kecil dari t tabel, maka H_a diterima,
- sedangkan jika t hitung lebih besar dari t tabel, maka H_a ditolak.

Uji t dapat juga dilakukan dengan hanya melihat nilai signifikansi t masing-masing variabel yang terdapat pada output hasil regresi menggunakan SPSS. Jika angka signifikansi t lebih kecil dari α (0,05) maka dapat dikatakan bahwa ada pengaruh yang kuat antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali, 2009).

BAB IV

ANALISIS HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Data dan Sampel

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari laporan tahunan /*annual report* perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2011-2013. Sumber data berasal dari situs Bursa Efek Indonesia, yang berupa laporan keuangan yang diterbitkan dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh perusahaan manufaktur yang *listing* di Bursa Efek Indonesia (BEI) dari tahun 2011-2013. Pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling*, dengan jumlah keseluruhan perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI dari tahun 2011-2013 adalah 142 perusahaan. Tabel 4.1 berikut ini menyajikan prosedur pemilihan sampel yang digunakan dalam penelitian ini :

Tabel 4.1. Prosedur Pemilihan Sampel

Keterangan	Jumlah
1. Perusahaan yang manufaktur terdaftar di BEI dari tahun 2011-2013.	142
Perusahaan yang tidak masuk sebagai sampel:	
1. Perusahaan manufaktur yang selama tahun penelitian 2011-2013 mengalami delisting.	(4)
2. Perusahaan yang tidak secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2011-2013.	(41)
3. Perusahaan manufaktur yang menggunakan mata uang asing selama tahun penelitian 2011-2013.	(16)
4. Perusahaan manufaktur yang tidak memiliki data mengenai kepemilikan saham perusahaan, selama tahun penelitian 2011-2013.	(53)
Total Sampel penelitian	32
Total Observasi penelitian 2011 sd 2013	96

Sumber : Indonesian Capital Market Directory. (Diakses tanggal 12 Desember 2014 -01 Januari, 2015)

Tabel 4.1 menunjukkan jumlah perusahaan yang tidak secara lengkap mempublikasikan laporan keuangan selama tahun penelitian 2011-2013 adalah 41 perusahaan. Perusahaan yang

menggunakan mata uang asing dalam laporan keuangannya adalah 16 perusahaan. Perusahaan yang tidak memiliki data mengenai kepemilikan saham perusahaan adalah 53 perusahaan. Jadi perusahaan yang diambil sebagai sampel 32 perusahaan dan jumlah observasi yang dilakukan selama tahun 2011-2013 adalah 96 item observasi.

4.1.2 Analisis Statistik Deskriptif

Tabel 4.2.Statistik Deskriptif

Descriptive Statistics					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
ETR	96	-2.3917	2.3057	.274047	.4105803
Institusional	96	.1800	.9800	.649375	.2462853
Komin	96	.2857	.8000	.418607	.1255726
Kualitas	96	0	1	.38	.487
Komite	96	2	5	3.03	.552
Direksi	96	2	13	5.31	2.514
Valid N (listwise)	96				

Tabel 4.2 menyajikan statistik deskriptif yang meliputi nilai minimum, maksimum, rata-rata (mean), dan deviasi standar. Nilai rata-rata (deviasi standar) ETR adalah 0,274 (0,4105). Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel memiliki *tax avoidance* yang rendah karena nilai rata-rata lebih rendah dari nilai maksimum sebesar 2,3057. Nilai minimum (maksimum) untuk kepemilikan saham perusahaan (institusional) adalah 0,18 (0,98), dan rata-rata (deviasi standar) institusional adalah 0,4186 (0,125). Hal ini berarti rata-rata perusahaan sampel memiliki tingkat kepemilikan saham perusahaan sebesar 64,93%.

Nilai minimum (maksimum) untuk komin adalah 0,28 (0,80), dan rata-rata (deviasi standar) komin adalah 0,418 (0,1255). Nilai minimum (maksimum) untuk anggota komite audit adalah 2 (5), dan rata-rata (deviasi standar) anggota komite audit adalah 3,03 (0,552). Nilai minimum (maksimum) untuk dewan direksi adalah 2 (13), dan rata-rata (deviasi standar) direksi adalah 5,31 (2,514). Hal ini menunjukkan bahwa keseluruhan perusahaan sampel mempunyai kesenjangan yang sangat tinggi dalam hal jumlah anggota dewan direksi terlihat bahwa minimal dewan direksi 2 orang dan terbanyak 13 orang dengan deviasi standar yang cukup besar dibanding variabel lain yaitu 2,514.

4.2 Uji Asumsi Klasik

Persyaratan untuk bisa menggunakan persamaan regresi berganda adalah terpenuhinya asumsi klasik. Untuk mendapatkan nilai yang efisien dan tidak bias atau BLUE (*Best Linear Unbias Estimator*) dari satu persamaan regresi berganda, maka perlu dilakukan pengujian untuk mengetahui model regresi yang dihasilkan memenuhi persyaratan asumsi klasik (Ghozali, 2009).

4.2.1 Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan menguji apakah dalam model penelitian variabel terdistribusi secara normal normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah model regresi yang memiliki distribusi nilai residual normal atau mendekati normal (Ghozali, 2009). Uji normalitas data dalam penelitian ini menggunakan pengujian *One-Sample Kolmogorov Smirnov test*. Hasil uji normalitas dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 4.3
Hasil Uji Normalitas

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ETR	Institusional	Komin	Kualitas	Komite	Direksi
N		96	96	96	96	96	96
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.247326	.649375	.418607	.38	3.03	5.31
	Std. Deviation	.3907544	.2462853	.1255726	.487	.552	2.514
Most Extreme Differences	Absolute	.256	.139	.278	.405	.418	.247
	Positive	.256	.090	.278	.405	.418	.247
	Negative	-.244	-.139	-.238	-.275	-.373	-.158
Kolmogorov-Smirnov Z		2.507	1.359	1.720	1.963	1.100	1.424
Asymp. Sig. (2-tailed)		.025	.350	.265	.155	.435	.319

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel 4.3 diatas menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*p-value*) variabel ETR mempunyai nilai 0,025 lebih kecil dari 0,05, sedangkan seluruh variabel lainnya lebih besar diatas level signifikansi 0,05, sehingga dilakukan uji normalitas kedua dengan menghilangkan data yang dirasa outlier. Menurut Ghozali (2009) outlier adalah data yang memiliki karakteristik unik yang terlihat sangat berbeda jauh dari observasi-observasi lainnya dan muncul dalam bentuk nilai ekstrim baik untuk sebuah variabel tunggal atau variabel kombinasi. Apabila ditemukan outliers, maka data yang bersangkutan harus dikeluarkan dari perhitungan lebih lanjut, berikut hasil uji normalitas kedua:

Tabel 4.4
Hasil Uji Normalitas Ke-dua

One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		ETR	Institusional	Komin	Kualitas	Komite	Direksi
N		93	93	93	93	93	93
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.266042	.641720	.418490	.39	3.05	5.38
	Std. Deviation	.1767615	.2463191	.1255664	.490	.539	2.519
Most Extreme Differences	Absolute	.223	.129	.279	.398	.432	.248
	Positive	.223	.085	.279	.398	.432	.248
	Negative	-.124	-.129	-.238	-.282	-.374	-.162
Kolmogorov-Smirnov Z		2.154	1.345	1.690	1.841	1.168	1.387
Asymp. Sig. (2-tailed)		.086	.390	.235	.174	.482	.384

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

Dari tabel 4.4 menunjukkan bahwa nilai signifikansi (*p-value*) seluruh variabel mempunyai nilai yang lebih kecil dari 0,05 sehingga dapat dinyatakan bahwa data dalam penelitian ini telah terdistribusi dengan normal.

4.2.2 Hasil Uji Multikolinearitas

Multikolinearitas terjadi jika nilai *tolerance* lebih kecil dari 0,10 yang berarti terjadi hubungan yang cukup besar antara variabel bebas dan tidak ada korelasi antar variabel independen yang nilainya lebih dari 95% (koefisien lemah tidak lebih besar dari 5) . Jika *VIF* lebih besar dari 10, apabila *VIF* kurang dari 10 dapat dikatakan bahwa variabel independen yang digunakan dalam model adalah dapat dipercaya dan obyektif.

Tabel 4.5
Hasil Uji Multikonearitas

Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	.240	.128		2.879	.006		
	Institusional	-.038	.082	-.054	-.466	.642	.861	1.162
	Komin	-.174	.172	-.053	-1.743	.027	.759	1.318
	Kualitas	-.141	.043	-.039	-1.733	.034	.812	1.231
	Komite	.028	.037	.085	.749	.456	.881	1.134
	Direksi	.000	.009	.006	.043	.966	.623	1.604

a. Dependent Variable: ETR

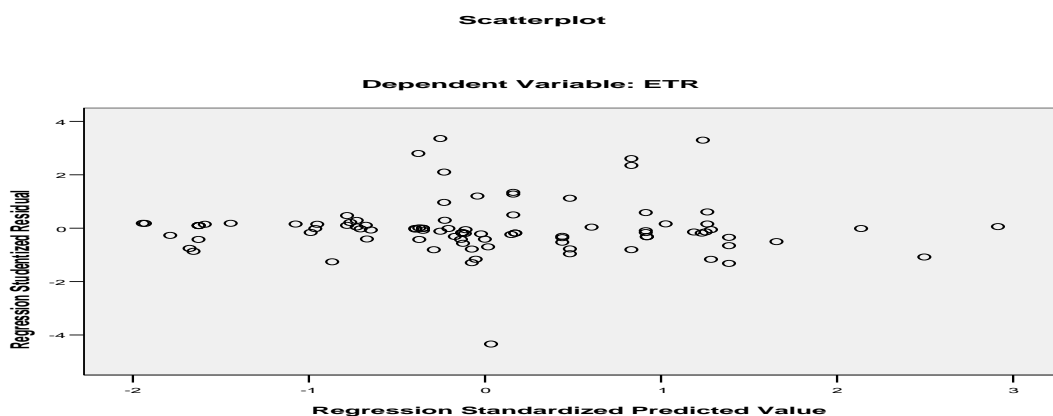
Berdasarkan uji multikolinearitas pada tabel 4.5 di atas, dapat dilihat bahwa hasil perhitungan nilai *tolerance* menunjukkan bahwa seluruh variabel bebas memiliki nilai *tolerance* lebih dari 0,10 (10%) yang artinya bahwa korelasi antar variabel bebas tersebut nilainya kurang dari 95%, dan hasil dari *varian inflation factor* (VIF) menunjukkan bahwa institusional, komin, kualitas, komite, dan direksi memiliki nilai VIF kurang dari 10. Dimana, jika nilai *tolerance*

lebih dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF kurang dari 10, maka dalam pengujian data tersebut tidak terdapat korelasi antar variabel bebas atau tidak terjadi multikolinearitas. Namun, bila sebaliknya yang terjadi dimana nilai *tolerance* kurang dari 0,10 atau 10% dan nilai VIF lebih dari 10, maka dapat dikatakan bahwa hasil pengujian yang dilakukan terdapat korelasi antar variabel bebas atau terjadi multikolinearitas.

4.2.3 Hasil Uji Heteroskedastisitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antar SRESID dan ZPRED dimana sumbu X adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu x adalah residual (Y prediksi – Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized* (Ghozali, 2009).

Gambar 4.1
Uji Heteroskedastisitas



Gambar 4.1 menunjukkan hasil pengujian heteroskedastisitas pada tampilan grafik scatterplots bahwa titik-titik tidak berkumpul dan menyebar secara acak baik di atas maupun di bawah angka 0 pada sumbu Y. Hal ini dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi pada penelitian ini.

4.2.4 Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 4.6
Hasil Uji Autokorelasi

Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	.506 ^a	.411	.346	.1807505	2.268

a. Predictors: (Constant), Direksi, Kualitas, Komite, Institusional, Komin

b. Dependent Variable: ETR

Uji autokorelasi bertujuan untuk mengetahui ada tidaknya korelasi antara variabel pengganggu pada periode tertentu dengan variabel pengganggu periode sebelumnya. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya autokorelasi akan dilakukan pengujian *Durbin-Watson* (Dw_test). Hasil pengujian diperoleh nilai $Dw = 2,268$ sedangkan $Du_{tabel} = 1,817$ ($N=93$, $k=5$). Berdasarkan kriteria tersebut maka $2,268 > 1,817$, sehingga dapat disimpulkan bahwa, tidak terjadi autokorelasi.

4.3 Uji Hipotesis

Pengujian hipotesis pada penelitian ini menggunakan uji statistik t, uji statistik t pada dasarnya menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel penjelas/ independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen, hasil uji hipotesis diperoleh sebagai berikut:

Tabel 4.7
Hasil Uji Hipotesis

Variabel Bebas	koefisien	t-tabel	t-statistik	Nilai Sig	Hipotesis
kepemilikan institusional	-0.038	-1.654	-0.466	0.642	tidak didukung
dewan komisaris independen	-0.174	-1.654	-1.743	0.027	didukung
kualitas audit	-0.141	-1.654	-1.733	0.034	didukung
komite audit	0.028	1.654	0.749	0.456	tidak didukung
dewan direksi	0.009	1.654	0.043	0.966	tidak didukung

Sumber: Lampiran 6, 2014.

Berdasarkan tabel 4.7 dan hasil perhitungan regresi pada lampiran dapat dibuat persamaan regresi linier berganda sebagai berikut:

$$Y = 0,240 - 0,038x_1 - 0,174x_2 - 0,141x_3 + 0,028x_4 + 0,009x_5$$

Dari model regresi yang terbentuk tersebut maka diperoleh hubungan antara masing-masing variabel independen (institusional, komin, kualitas, komite, dan direksi) dengan variabel dependen (ETR) yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Nilai konstanta bertanda positif sebesar **0,240** menyatakan, bahwa jika tidak ada kegiatan dari ke-lima variabel bebas tersebut yang mempengaruhi *tax avoidance* (ETR), maka *tax avoidance* (ETR) adalah positif.
2. Koefisien regresi X1 bertanda negatif sebesar **-0.038** menyatakan, bahwa variabel kepemilikan saham perusahaan (institusional) memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*, tetapi tidak signifikan karena mempunyai nilai signifikan

(0,642) lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan “*kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap tax avoidance*,” ditolak.

3. Koefisien regresi X2 bertanda negatif sebesar **-0.174** menyatakan, bahwa variabel dewan komisaris independen memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*, serta mempunyai nilai signifikan (0,027) lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan “*dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap tax avoidance*,” diterima.
4. Koefisien regresi X3 bertanda negatif sebesar **-0.141** menyatakan, bahwa variabel kualitas audit memiliki pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*, serta mempunyai nilai signifikan (0,034) lebih kecil dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan “*kualitas audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance*,” diterima.
5. Koefisien regresi X4 bertanda positif sebesar **0.028** menyatakan, bahwa variabel komite audit memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*, tetapi tidak signifikan karena mempunyai nilai signifikan (0,456) lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan “*komite audit berpengaruh negatif terhadap tax avoidance*,” ditolak.
6. Koefisien regresi X5 bertanda positif sebesar **0.009** menyatakan, bahwa variabel dewan direksi memiliki pengaruh yang positif terhadap *tax avoidance*, tetapi tidak signifikan karena mempunyai nilai signifikan (0,966) lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis yang menyatakan “*dewan direksi berpengaruh negatif terhadap tax avoidance*”, ditolak.

4.4 Pembahasan

Penelitian ini merupakan studi yang melakukan analisis untuk menguji pengaruh komponen *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa model regresi sesuai dengan hasil observasi dari penelitian. Dimana hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat yang digunakan dalam penelitian berhubungan dengan variabel bebasnya. Selanjutnya pengaruh masing-masing variabel tersebut dapat terlihat pada tabel 4.5 dan mempunyai makna sebagai berikut:

7.

4.4.1 Pengaruh Kepemilikan Institusional Terhadap *Tax Avidance*

Berdasarkan hasil pengujian kepemilikan institusional ini dapat diperoleh dengan cara membagi saham yang dimiliki perusahaan dengan jumlah saham beredar terhadap *tax*

avoidance, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel kepemilikan institusional (institusional) yang berada di atas 0,05 serta nilai konstanta yang negatif menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*” ditolak.

Hasil penelitian ini mempunyai kesamaan dengan hasil penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyatakan bahwa kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance* dan berlawanan hasil dengan Irawan dan Aria (2012) yang membuktikan bahwa kepemilikan saham institusi berpengaruh negatif terhadap manajemen pajak, meskipun demikian pemilik institusional memainkan peran penting dalam memantau, mendisiplinkan dan mempengaruhi manajer, mereka berpendapat bahwa seharusnya pemilik institusional berdasarkan besar dan hak suara yang dimiliki, dapat memaksa manajer untuk berfokus pada kinerja ekonomi dan menghindari peluang untuk perilaku mementingkan diri sendiri. Hasil penelitian ini mengindikasikan pengawasan dari dewan komisaris independen yang kurang optimal sebagai alat pengawasan manajemen, selain itu keberadaan komisaris independen hanya untuk memenuhi ketentuan formal atau regulasi saja tetapi tidak untuk menegakkan *good corporate governance*.

4.4.2 Pengaruh Dewan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian komisaris independen yang diukur dengan jumlah komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris terhadap *tax avoidance*, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel komisaris independen (komin) yang berada di bawah 0,05 serta nilai konstanta yang negatif menunjukkan bahwa variabel komisaris independen mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance* oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*” diterima.

Hasil penelitian yang berpengaruh negatif sesuai dengan penelitian Bernard (2011) membuktikan bahwa terdapat hubungan signifikan negatif proporsi dewan komisaris independen dengan manajemen pajak. Komisaris independen merupakan pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham pengendali, anggota direksi dan dewan komisaris lain. Dan perusahaan itu sendiri baik dalam bentuk hubungan bisnis maupun kekeluargaan. Dalam hal ini dewan komisaris tidak boleh melibatkan diri dalam tugas-tugas manajemen dan tidak boleh mewakili perusahaan dalam transaksi-transaksi dengan pihak ketiga. Anggota dewan

komisaris independen harus bertindak berdasarkan informasi yang jelas, dengan itikad yang baik, berdasarkan kehati-hatian, serta demi kepentingan perusahaan dan pemegang saham. Subprinsip ini menyatakan dua elemen penting dari tanggung jawab pengelolaan dewan, yaitu kewajiban kehati-hatian dan kewajiban kesetiaan. Kemudian kehadiran komisaris independen dalam dewan komisaris mampu meningkatkan pengawasan kinerja direksi.

4.4.3 Pengaruh Kualitas Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian kualitas audit yang diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran Kantor Akuntan Publik (KAP) terhadap *tax avoidance*, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel kualitas audit (kualitas) yang berada di bawah 0,05 serta nilai konstanta yang negatif menunjukkan bahwa variabel kualitas audit mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance* oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*” diterima.

Hasil penelitian ini sesuai dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) yang menyimpulkan bahwa kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya, oleh karena itu diduga perusahaan yang diaudit oleh KAP *The Big Four* memiliki tingkat kecurangan yang lebih rendah dibandingkan dengan perusahaan yang diaudit oleh KAP non *The Big Four*.

4.4.4 Pengaruh Komite Audit Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian komite audit yang diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan terhadap *tax avoidance*, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel komite audit (institusional) yang berada di atas 0,05 serta nilai konstanta yang positif menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* oleh karena itu, hipotesis ke-empat yang menyatakan bahwa “komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*” ditolak.

Hasil penelitian ini berlawanan hasil dengan penelitian Annisa dan Kurniasih (2012) yang membuktikan bahwa komite audit dan kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*. Komite audit adalah orang atau sekelompok orang sekurang kurangnya tiga orang yang independen di dalam perusahaan yang dipilih juga secara independen yang mempunyai kapabilitas dan kompetensi dalam bidang akuntansi dan keuangan, komite audit bertanggung jawab kepada dewan komisaris (Pohan, 2008). Hasil penelitian yang tidak berpengaruh

dimungkinkan pada perhitungan statistik deskriptif masih terdapat perusahaan yang hanya mempunyai 2 anggota komite audit, padahal BEI memberi syarat paling sedikit komite audit harus tiga orang, kurang dari tiga orang maka tidak sesuai dengan peraturan BEI (Pohan, 2008), jadi jika jumlah komite audit dalam suatu perusahaan tidak sesuai dengan peraturan BEI maka akan meningkatkan tindakan manajemen dalam melakukan minimalisasi laba untuk kepentingan pajak (Pohan, 2008).

4.4.5 Pengaruh Dewan Direksi Terhadap *Tax Avoidance*

Berdasarkan hasil pengujian dewan direksi yang diukur dengan jumlah total anggota dari dewan direksi dalam suatu perusahaan terhadap *tax avoidance*, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel dewan direksi (direksi) yang berada di atas 0,05 serta nilai konstanta yang positif menunjukkan bahwa variabel dewan direksi tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* oleh karena itu, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*” ditolak.

Dewan direksi dalam urutan manajemen merupakan tingkatan tertinggi setelah pemegang saham. Dewan direksi memegang peranan sentral dalam *corporate governance* karena hukum perseroan memusatkan tanggung jawab legal atas urusan perusahaan pada dewan direksi. Fungsi direksi adalah sebagai wakil dewan komisaris untuk melakukan pengelolaan perusahaan dalam rangka menjalankan tata kelola perusahaan yang baik. Hasil penelitian ini berlawanan hasil dengan penelitian Irawan dan Aria (2012) yang membuktikan bahwa kepemilikan saham direksi dan kompensasi memberikan pengaruh yang positif terhadap manajemen pajak, hasil penelitian yang tidak berpengaruh menyimpulkan adanya manipulasi dalam menyajikan laporan keuangan untuk kepentingan perpajakan tidak dipengaruhi oleh dewan direksi.

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1 Simpulan

Penelitian ini merupakan studi yang melakukan analisis untuk menguji pengaruh komponen *corporate governance* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan manufaktur di Bursa Efek Indonesia periode 2011-2013. Berdasarkan hasil penelitian ini diperoleh bahwa model regresi sesuai dengan hasil observasi dari penelitian. Dimana hal ini menunjukkan bahwa variabel terikat yang digunakan dalam penelitian berhubungan dengan variabel bebasnya. Berdasarkan uraian pada pembahasan, maka penulis menarik beberapa simpulan bahwa :

1. Berdasarkan hasil pengujian kepemilikan institusional ini dapat diperoleh dengan cara membagi saham yang dimiliki perusahaan dengan jumlah saham beredar terhadap *tax avoidance*, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel kepemilikan institusional yang berada di atas 0,05 serta nilai konstanta yang negatif menunjukkan bahwa variabel kepemilikan institusional tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* oleh karena itu, hipotesis pertama yang menyatakan bahwa “kepemilikan institusional berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*” ditolak.
2. Berdasarkan hasil pengujian komisaris independen yang diukur dengan jumlah komisaris independen kemudian dibagi dengan jumlah komisaris terhadap *tax avoidance*, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel komisaris independen yang berada di bawah 0,05 serta nilai konstanta yang negatif menunjukkan bahwa variabel komisaris independen mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance* oleh karena itu, hipotesis kedua yang menyatakan bahwa “dewan komisaris independen berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*” diterima.
3. Berdasarkan hasil pengujian kualitas audit yang diukur berdasarkan besar kecilnya ukuran kantor akuntan publik terhadap *tax avoidance*, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel kualitas audit yang berada di bawah 0,05 serta nilai konstanta yang negatif menunjukkan bahwa variabel kualitas audit mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance* oleh karena itu, hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa “kualitas audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*” diterima.

4. Berdasarkan hasil pengujian komite audit yang diukur dengan jumlah anggota komite audit dalam suatu perusahaan terhadap *tax avoidance*, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel komite audit yang berada di atas 0,05 serta nilai konstanta yang positif menunjukkan bahwa variabel komite audit tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* oleh karena itu, hipotesis ke-empat yang menyatakan bahwa “komite audit berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*” ditolak.
5. Berdasarkan hasil pengujian dewan direksi yang diukur dengan jumlah total anggota dari dewan direksi dalam suatu perusahaan terhadap *tax avoidance*, dapat diketahui bahwa nilai signifikan variabel dewan direksi yang berada di atas 0,05 serta nilai konstanta yang positif menunjukkan bahwa variabel dewan direksi tidak mempunyai pengaruh terhadap *tax avoidance* oleh karena itu, hipotesis kelima yang menyatakan bahwa “dewan direksi berpengaruh negatif terhadap *tax avoidance*” ditolak.

5.3 Saran

1. Penelitian selanjutnya dapat menggunakan proksi pengukuran *corporate governance* secara *comprehensive* (bersama-sama) terhadap *tax avoidance*, misalnya menggunakan *corporate governance indeks*, sehingga dapat dilihat pengaruh *corporate governance* secara utuh.
2. Penelitian selanjutnya apabila data pajak penghasilan perusahaan memungkinkan untuk diperoleh, maka data tersebut dapat digunakan sebagai proksi *tax avoidance* yang lebih akurat.
3. Bagi investor hendaknya mempertimbangkan kualitas audit yang diproksikan dengan ukuran kantor akuntan publik, karena hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas audit mempunyai pengaruh yang negatif terhadap *tax avoidance*, laporan keuangan yang diaudit oleh auditor KAP *The Big Four* menurut beberapa referensi dipercaya lebih berkualitas sehingga menampilkan nilai perusahaan yang sebenarnya.
4. Bagi perusahaan agar dapat menjadi bahan untuk menambah pengetahuan dan wawasan tentang *tax avoidance*, sehingga manajemen perusahaan bisa merancang mekanisme pelaksanaan kelanjutannya dengan baik, dengan tidak melakukan perencanaan pajak yang ilegal sehingga perusahaan tidak melakukan kecurangan pajak (*tax evasion*) yang dapat merugikan negara dan dapat membuat nama dan reputasi perusahaan tersebut menjadi buruk di mata publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Annisa, Nuralifmida Ayu dan Kurniasih, Lulus, 2012. Pengaruh corporate governance terhadap Tax avoidance. *Jurnal Akuntansi & Auditing*. Volume 8. No2.
- Barr, N.A., James, S.R., & Prest, A.R. (1977). *Self-Assessment for Income Tax*. London, Heinemann.
- Bernard, Sinaga. 2011. Pengaruh Karakteristik *corporate governance*, kompensasi terhadap Manajemen Pajak. *Jurnal Akuntansi dan Keuangan*, Vol. 11, No. 1, Mei 2009: 30-41.
- Bovi, Maurizio. 2005. *Book-Tax Gap, An Income Horse Race*. Working Paper No. 61, Desember 2005.
- Budiman, Judi dan Setiyono, 2012. "Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*)". Universitas Islam Sultan Agung, Semarang.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are family firms more tax aggressive than non-family firms?. *Journal of Financial Economics* 95, 41–61.
- Desai, M. A. dan D. Dharmapala. 2007. *Corporate Tax Avoidance and Firm Value*. Journal of Financial Economics.
- Dyreng, Scoot O, ; Hanlon, Michelle; Maydew Edward, 2010, *The Effect of Executives on Corporate Tax Avoidance*, *The Accounting Review*, 83, 61-82.
- Effendi Arief, 2009. *The Power Of Good Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Salemba Empat: Jakarta.
- Friese, A., S. Link, dan S. Mayer. 2006. *Taxation and Corporate Governance*. Working Paper.
- FCGI, 2004. *Corporate Governance: Tata Kelola Perusahaan*. Edisi Ketiga, Jakarta.
- Ghozali dan Chariri, 2007. *Teori Akuntansi*. Semarang: Badan Penerbit Undip.
- Ghozali, Imam. 2009. *Aplikasi Analisis Multivivariate dengan Program SPSS*. Badan Penerbit Universitas Diponegoro. Semarang.
- Haruman, Tendi. 2008. Pengaruh Struktur Kepemilikan terhadap Keputusan Keuangan dan Nilai Perusahaan: Survey pada Perusahaan Manufaktur di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi XI*. 23-24 Juli 2008, Pontianak.

- Ikatan Akuntansi Indonesia. 2009. *ED PSAK No. 01 (Revisi 2009)*. Salemba Empat. Jakarta.
- Irawan, Hendra dan Aria F. 2012. "Pengaruh Kompensasi Manajemen dan Corporate Governance terhadap Manajemen Pajak Perusahaan". *Simposium Nasional Akuntansi XV Banjarmasin 20-23 September 2011*.
- Jensen, M.C., & Meckling W.H. (1976). Theory of The Firm: Managerial Behavior, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economics*, 3, 4, 305-360.
- Masri, Indah dan Martani, Dwi. 2012. Pengaruh Tax Avoidance Terhadap Cost Of Debt. *Jurnal Program Pasca Sarjana Ilmu Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.
- Pohan, H. T. 2008. *Pengaruh Good Corporate Governance, Rasio Tobin's q, Perata Laba terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Publik*. <http://hotmanpohan.blogspot.com>
- Ratnasari, Yunita. 2011. Pengaruh *Corporate Governance* terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam *Sustainability Report*. *Skripsi*. Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Diponegoro. Semarang.
- Republik Indonesia, Perdirjen No. Per-43/Pj/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran dan Kelaziman Usaha dalam Transaksi Antara Wajib Pajak dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa.
- Republik Indonesia, Surat Direktur Jendral Pajak No. 5-14/Pj.7/2003 Tentang Program Optimalisasi Penerimaan Pajak.
- Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.
- Sartori, Nicola. 2010. *Effect of Strategic Tax Behaviors on Corporate Governance*. www.ssrn.com
- Scott, W., R. 2003. *Financial Accounting Theory*. Toronto Canada: Prentice-Hall.
- Suandy, Erly. 2008. *Perencanaan Pajak*. Edisi 4. Jakarta: Salemba Empat.
- Subramaniam, Nava, L. McManus, and Jiani Zhang. 2009. "Corporate Governance, Firm Characteristic, and Risk Management Committee Formation in Australia Companies". *Managerial Auditing Journal*, Vol.24, No.4, pp.316-339.
- Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Bisnis*. Bandung: CV. Alfabeta.
- Sulistiyanto, dan Wibisono, Haris. 2003. *Seasoned Equity Offerings: Antara Agency Theory, Windows Of Opportunity*, dan Penurunan Kinerja. Diambil dari situs artikel pendidikan network.

Warsidi dan Pramuka, Bambang Agus. 2009, Evaluasi Kegunaan Rasio Keuangan dalam Memprediksi Perubahan Laba di Masa yang Akan Datang”, Artikel di internet, *Jurnal Akuntansi Manajemen dan Ekonomi*, Vol 2:1.

Widianto, Hari Suryono dan Andri Prastiwi. 2011. Pengaruh Karakteristik Perusahaan dan *Corporate Governance* Terhadap Praktik Pengungkapan *Sustainability Report*. *Proceeding Simposium Nasional Akuntansi XIV*, Banda Aceh, 21-22 Juli 2011.

<http://www.beritasatu.com/nasional/18660-sidang-tuntutan-penggelapan-pajak-asian-agri-ditunda.html> diakses 22 Agustus 2014.

<http://www.liputan6.com/tag/kasus-penggelapan-pajak> diakses 22 Agustus 2014.

Idx.co.id. Diakses tanggal 12 Desember 2014 -01 Januari, 2015.

mucglobal.com/news, diakses 22 Agustus 2014.

____www.google.co.id